

FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERHOTELAN
DI KOTA JAMBI

Azizah¹

Abstract

The aim of the research is to find out the number of room occupants, average tariff per room, and deflator PDRB that become the factors determining tax revenue of hotels in Jambi City. The research was a descriptive study. The methods of obtaining the data were observation and library research. The data were secondary data of time series. They were analyzed by using regression analysis. The results reveal that the number of hotel visitors staying and using hotel facilities with average payment and tariff per room has a significant influence on hotel tax revenue. On the other hand, deflator PDRB does not have a significant influence on hotel tax revenue in Jambi City.

Keyword : Revenue, Tax, Hotel

PENDAHULUAN

Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara- negara berkembang mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata. Menurut Kusumowindo (1981) memberikan pengertian tenaga kerja sebagai berikut: tenaga kerja adalah jumlah semua penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang atau jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja meraka, mereka pun berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam undang- undang pokok ketenaga- kerjaan no.4 tahun 1969 dinyatakan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaga kerja sendiri baik tenaga kerja fisik maupun tenaga kerja pikiran. (Soeroto, 1986)

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesempatan kerja adalah melalui pembangunan di sektor industri. Pembangunan di sektor industri merupakan bagian dari usaha jangka panjang untuk memperbaiki struktur ekonomi yang tidak seimbang.

Sehubungan dengan upaya pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan mengglobal dimana segenap kemampuan modal dan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya perlu dimaksimalkan. Hal ini perlu ditunjang oleh kebijaksanaan dan langkah- langkah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar.

Pengembangan kepariwisataan diharapkan menjadi salah satu penghasil devisa yang diandalkan di luar non migas. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan dunia kepariwisataan, perlu ditingkatkan upaya dalam bentuk industri kepariwisataan, baik oleh

pemerintah, semua jajaran terkait seperti Departemen Seni dan Budaya, Dinas Pariwisata, dan Perusahaan Swasta yang bergerak dibidang industri pariwisata. Untuk menunjang upaya tersebut dalam hal ini melalui kerja sama dikalangan pemerintah dan swasta, maka berbagai kebijaksanaan seperti promosi, mutu pelayanan, dan mutu obyek wisata melalui kerja sama sektoral secara terpadu dilaksanakan upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik dimana dampaknya diharapkan akan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Kesempatan kerja menurut Payaman, (1985) mengemukakan bahwa besarnya permintaan perusahaan akan tenaga kerja pada dasarnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut.

Kota Jambi sebagai salah satu daerah perdagangan dan daerah transit akan semakin membuka peluang pembangunan sarana penunjang lainnya, seperti pembangunan hotel, rumah makan, dan pengembangan transportasi dalam rangka pelayanan kepada para wisatawan. Pembangunan tersebut diharapkan akan membuka “kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat dalam kegiatan perekonomian khususnya pada bidang kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata yang diprogramkan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta akan diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara karena merupakan sumber devisa yang cukup signifikan. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah secara positif mempengaruhi tingkat kesempatan kerja khususnya dibidang pariwisata. Oleh karena itu sektor pariwisata perlu didukung oleh beberapa indikator penunjang, baik dibidang transportasi maupun dibidang akomodasi serta pelayanan. Sehingga volume wisatawan yang berkunjung ke daerah- daerah khususnya di Kota Jambi semakin meningkat, yang pada akhirnya bermuara pada penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta dapat pula mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada bidang industri pariwisata.

Pajak perhotelan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah sejak tahun 1975. Kota Jambi juga menerapkan jenis pajak ini dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Berikut ini di gambaran target dan realisasi pajak perhotelan di Kota Jambi dari Tahun 1998-2010 pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Perhotelan di Kota Jambi Tahun 1998-2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan (%)
1998	98.500.000	86.987.000	88,32
1999	102.520.000	96.804.000	94,42
2000	105.873.000	103.232.000	97,51
2001	110.995.000	108.975.000	98,18
2002	119.125.000	113.921.000	95,63
2003	128.224.000	128.411.000	100,15
2004	140.127.000	137.264.000	97,96
2005	155.000.000	154.207.000	99,49
2006	187.540.000	186.059.000	99,21
2007	220.980.000	218.809.000	99,02
2008	325.900.000	315.310.000	96,75
2009	395.000.000	326.975.000	82,77
2010	430.500.000	423.216.000	98,31

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jambi

Perhitungan yang tepat terhadap potensi yang sebenarnya diharapkan akan diterapkan pada penetapan target untuk memperoleh hasil maksimal. Demikian juga pemberlakuan yang sama terhadap intensifikasi pajak terutama pada

$$y = f(x_1, x_2, x_3)$$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3$$

dimana :

y : Penerimaan Pajak Perhotelan

x₁ : Jumlah hunian kamar

x₂ : Tarif rata-rata kamar

x₃ : PDRB deflator

β₁... β₃ : parameter-parameter yang dicari

β₀ : konstanta

μ : Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh jumlah hunian kamar (x₁), tarif rata-rata kamar (x₂), dan PDRB deflator terhadap penerimaan

Tabel 2. Hasil Estimasi Faktor Penentu Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Jambi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t-hitung	Sig-t	Sig-f
	B	Std. Error				
Constanta	-95.920.468	7.659.832		-9,245	,000	0.000
Jumlah hunian kamar	8.509.491	426.670	,471	12,920	,000	
Tarif rata-rata kamar	1.681.787	119.162	,546	8,317	,000	
PDRB deflator	15.693	23.960	,311	,587	,829	
R ² = 0,989				F _{hitung} = 1882,281		
Adj R ² = 0,987				N = 13		

Sumber : Diolah dari data sekunder, tahun 2011

Berdasarkan data pada Tabel 3 diatas, dibuat model persamaan regresi dengan variabel jumlah hunian kamar, tarif rata-rata kamar, dan PDRB

tingkat jumlah hunian kamar, tarif rata-rata kamar, dan PDRB deflator sehingga pada gilirannya akan mening-katkan kontribusi pajak perhotelan terhadap PAD khususnya penerimaan pada pajak daerah di Kota Jambi. Atas dasar pertimbangan latar belakang demikian maka penelitian ini diberi judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Jambi”.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari laporan keuangan daerah, membaca berbagai buku dan referensi lainnya termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh landasan teori yang dapat mendukung analisis yang dilakukan dalam mengolah data. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan secara kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak perhotelan di Kota Jambi Tahun 1998-2010, dan untuk mencari tingkat jumlah hunian kamar, tarif rata-rata kamar, dan PDRB deflator terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Jambi selama Tahun 1998-2010, dianalisis dengan menggunakan alat analisis regresi berganda. Adapun formula regresi berganda sebagai berikut :

pajak perhotelan di Kota Jambi. Dengan demikian, dalam model ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Berikut tabel hasil estimasi:

deflator terhadap penerimaan pajak perhotelan di Kota Jambi, sebagai berikut :

$$y = -95.920.468 + 8.509.491x_1 + 1.681.787x_2 + 15.693x_3$$

Pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent) dapat diketahui dari hasil analisis regresi, dimana diperoleh nilai signifikansi -F lebih kecil dari level of signifikansi ($0,000 < 0,05$), artinya semua variabel independen yaitu jumlah hunian kamar (x_1), tarif rata-rata kamar (x_2), dan PDRB deflator (x_3) di dalam model (secara simultan) mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap variabel terikat (dependent) yaitu penerimaan pajak perhotelan (y). Dengan demikian secara statistik data yang digunakan dapat membuktikan bahwa secara bersama-sama variabel bebas (independent) : Jumlah hunian Kamar (x_1), Tarif rata-rata kamar (x_2), dan PDRB deflator (x_3) berpengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Perhotelan (y).

Dari hasil analisis, maka diperoleh koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,989, maka hal tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel terikat (dependent) dapat dijelaskan oleh model atau

keseluruhan variabel bebas (independent) adalah sebesar 98,9 persen dan sisanya sebesar 1,1 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model (error term). Persentase pengaruh

variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat (dependent) dalam persamaan regresi tersebut

menunjukkan pengaruh yang besar (98,9%). Dengan demikian, jika diukur dari besarnya pengaruh

variabel bebas terhadap perubahan nilai variabel terikat tersebut, maka persamaan regresi

yang dihasilkan dalam model ini dianggap layak untuk mengestimasi nilai variabel terikat.

1. Jumlah Hunian Kamar

Untuk mengetahui perkembangan jumlah hunian kamar, maka perlu diketahui jumlah hunian kamar di Kota Jambi. Oleh karena itu besarnya jumlah hunian kamar di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah hunian Kamar di Kota Jambi Tahun 1998-2010

Tahun	Jumlah Hunian Kamar (Unit)	Perkembangan (%)
1998	18.607	-
1999	18.981	2,00
2000	19.750	4,05
2001	21.351	8,11
2002	22.835	4,73
2003	23.941	4,84
2004	24.977	4,32
2005	26.003	4,11
2006	27.885	7,24
2007	28.392	1,82
2008	30.231	6,48
2009	32.745	8,32
2010	34.998	6,88

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jambi

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah pengunjung yang menginap di hotel pada

Kota

Jambi selama kurun waktu tahun anggaran 1998 sampai dengan tahun 2010 selalu mengalami fluktuatif. Perkembangan yang tertinggi terjadi Pada tahun 2009 sebesar 8,32%, sedangkan yang terendah di tahun 1999 sebesar 2,00%.

Salah satu penyebab terjadinya fluktuatif pertumbuhan jumlah hunian kamar karena kurangnya

kegiatan pemerintah maupun pengusaha hotel dalam mempromosikan daerah Jambi terutama mengenai potensi untuk berusaha, berkerjasama, maupun menggali potensi pariwisata yang ada, sehingga semakin banyak pengunjung datang dan tentunya penerimaan pajak hotel juga akan

meningkat.

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel jumlah hunian kamar (x_1) sebagai variabel

bebas (independent) menunjukkan pengaruh yang sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Nilai parameter dari jumlah hunian kamar (x_1) menunjukkan pengaruh yang positif terhadap penerimaan

pajak perhotelan (y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 8.509.491. Ini berarti bahwa setiap kenaikan jumlah hunian kamar sebesar 1 unit maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan

penerimaan pajak perhotelan sebesar Rp. 8.509.491,- begitu pula sebaliknya apabila terdapat penurunan jumlah hunian kamar sebesar 1 unit maka akan menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak perhotelan sebesar Rp. 8.509.491,-. Dengan asumsi bahwa variabel lain konstan

(ceteris paribus). Dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau tingkat kepercayaan sebesar 100 mengindikasikan bahwa variabel jumlah hunian kamar secara parsial menyumbang sebesar 100 persen terhadap penerimaan pajak perhotelan.

2. Tarif Rata-Rata Kamar

Untuk mengetahui perkembangan tarif rata-rata kamar di Kota Jambi. Oleh karena itu besarnya tarif rata-rata kamar di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 4. Perkembangan Tarif Rata-rata Kamar di Kota Jambi Tahun 1998-2010

Tahun	Tarif Rata-rata Kamar (Rp)	Perkembangan (%)
1998	49.000	-
1999	58.600	19,59
2000	59.300	1,19
2001	68.900	16,19
2002	69.000	0,15
2003	70.500	2,17
2004	74.400	5,53
2005	96.700	3,09
2006	110.200	13,96
2007	118.800	19,21
2008	127.800	7,80

2009	155.000	21,28
2010	195.000	25,81

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jambi

Tabel diatas menunjukkan perkembangan tarif rata-rata kamar ditahun 1998 hingga 2010 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 1999 pertumbuhannya mencapai 19,59%, tahun 2000 pertumbuhannya sangat menurun yaitu 1,19% dan dari tahun 2002 hingga 2005 pertumbuhannya rata-rata dibawah 10%. Setelah pada tahun 2006 pertumbuhannya naik sebesar 13,96%.

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel tarif rata-rata kamar (x_2) sebagai variabel bebas (independent) menunjukkan pengaruh yang sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Nilai parameter dari tarif rata-rata kamar (x_2) menunjukkan pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak perhotelan (y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 1.681.787. Ini berarti bahwa setiap kenaikan tarif rata-rata kamar sebesar 1 rupiah maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak perhotelan sebesar Rp. 1.681.787,- begitu pula sebaliknya apabila terjadinya penurunan tarif rata-rata kamar sebesar 1 rupiah maka akan menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak perhotelan sebesar Rp. 1.681.787,-. Dengan asumsi bahwa variabel lain konstan (ceteris paribus).

Dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau tingkat kepercayaan sebesar 100 mengindikasikan bahwa variabel tarif rata-rata kamar secara parsial menyumbang sebesar 100 persen terhadap penerimaan pajak perhotelan.

3. PDRB Deflator

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Adapun kegunaan PDRB adalah :

- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi**
Tingkat pertumbuhan ekonomi regional baik secara menyeluruh maupun sektoral, dengan melihat prosentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.
- Tingkat Kemakmuran**
Mengetahui tingkat kemakmuran daerah, baik tingkat pertumbuhan maupun tingkat kemakmuran dibanding dengan daerah lain, tingkat kemakmuran suatu wilayah biasanya diukur dengan besarnya pendapatan perkapita penduduknya. Tingkat kemakmuran ini tidak mengalami perubahan apabila laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonominya.
- Tingkat Inflasi atau Deflasi**
Mengetahui tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi dalam waktu tertentu, dengan

membandingkan antara PDRB atas dasar berlaku dan PDRB atas dasar konstan, dapat diperoleh suatu indeks implisit yang bisa menggambarkan kenaikan suatu penurunan harga barang dan jasa.

d. Struktur Perekonomian

Mengetahui gambaran struktur perekonomian daerah, PDRB dapat digunakan sebagai indikator tentang komposisi struktur perekonomian suatu wilayah, yaitu dengan menyusun peranan masing-masing sektor/lapangan usaha

e. Potensi Suatu Wilayah

Mengetahui potensi suatu daerah terhadap regional secara keseluruhan maupun sektoral. Dengan melihat peranan sektoral dalam suatu wilayah kabupaten atau peranan keseluruhan suatu wilayah propinsi. Dengan demikian maka pendapatan regional sangat bermanfaat bagi perencana maupun pengambil keputusan, baik yang berhubungan dengan rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

Adapun untuk mengetahui PDRB deflator dapat dihitung dengan cara membagi antara pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dan dikalikan 100 persen. Untuk lebih lanjut mengetahui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto deflator keseluruhan selama 13 tahun dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. PDRB Deflator Kota Jambi Tahun 1998-2010

Tahun	PDRB Berlaku (000 Rp)	PDRB Konstan (000 Rp)	PDRB Deflator (Rp)
1998	198.836.570	159.469.280	124,69
1999	287.096.710	150.775.230	190,41
2000	337.825.810	157.015.290	215,15
2001	399.672.400	167.892.670	238,05
2002	463.756.760	426.154.950	108,82
2003	528.396.380	450.375.300	117,32
2004	600.017.700	472.914.830	126,88
2005	679.187.080	502.367.170	135,02
2006	786.090.780	532.393.090	147,65
2007	902.559.100	569.455.480	158,50
2008	1.063.435.380	609.224.940	174,56
2009	1.298.778.861	655.255.150	198,21
2010	1.612.849.600	707.234.850	228,05

Sumber : Data Hasil olahan 2011

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel PDRB deflator (x_3) sebagai variabel bebas (independent) menunjukkan pengaruh yang sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Analisis parsial menghasilkan koefisien sig-t = 0,829, menjelaskan bahwa PDRB deflator (x_3) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak perhotelan (y) di Kota Jambi.

Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa variabel PDRB deflator mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak perhotelan. Ini dikarenakan kenaikan harga/inflasi tidak

mempengaruhi pertimbangan utama konsumen untuk menginap di hotel yang akhirnya berdampak pada penerimaan pajak perhotelan di Kota Jambi. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena proporsi PDRB deflator untuk penerimaan pajak perhotelan didapat dari penduduk luar Kota Jambi bukan dari penduduk lokal atau masyarakat Kota Jambi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena penerimaan pajak perhotelan di Kota Jambi secara umum mengalami kenaikan dan sangat potensial, sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak andalan bagi Kota Jambi.
2. Dari hasil analisis, variabel jumlah hunian kamar, tarif rata-rata kamar, (secara simultan) mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan pajak perhotelan, sedangkan PDRB deflator mempunyai kontribusi yang tidak signifikan ditandai uji F statistik. Mengindikasikan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan dalam model ini dianggap layak untuk mengestimasi nilai variabel terikat.
3. Jika dilihat secara parsial maka hanya variabel jumlah hunian kamar, dan tarif rata-rata kamar berpengaruh signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan sedangkan variabel PDRB deflator tidak signifikan untuk mengestimasi variabel penerimaan pajak perhotelan.

Saran

Sebagai kegiatan lanjutan, maka penulis memberikan saran-saran kepada Pemerintah Kota Jambi antara lain:

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Jambi supaya variabel jumlah pengunjung hotel dan tarif rata-rata kamar dapat dijadikan indikator dalam menentukan peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Jambi.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Jambi agar target yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari potensi yang benar-benar ada.
3. Disarankan Pemerintah Kota Jambi melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi pajak terhadap wajib pajak hotel sehingga taat dan patuh melaksanakan kewajibannya
4. Disarankan pada peneliti yang akan datang yang melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini namun menggunakan metode penelitian secara kualitatif agar dimasukkan variabel kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2006. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Makassar

Davey, K.J., 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI - Press, Jakarta.

Harun, H. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. BPFE. Yogyakarta

Insukindro, Mardiasmo, Widayat, W., Wihana, K.J., Halim, A., Suprihanto, J., Purnomo, B., 1994. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah*

dalam usaha peningkatan PAD, KKD, FE-UGM, Yogyakarta

Jamil, A. dan Rahayu, A., 1997. "Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan sebagai Sumber Pendapatan Asli daerah", JEP., Vol. : 2 No. : 3, 312 - 323

Kaho, R. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Radja Grafindo Persada. Jakarta

Manurung. J. 2005. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Mardiasmo, 2002, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset. Yogyakarta

_____, 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset. Yogyakarta

Mariot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada

Mugodim, 1999. *Perpajakan*. U-I Press, Yogyakarta

Pallawa, 2008, *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB Kabupaten/Kota*, CV. Rioma, Makassar

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel. Bagian Hukum Sekretariat Jambi

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Bagian Hukum Setda Kota Jambi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Dan 66 Tahun 2001. Tentang Peraturan Pelaksana Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. CV. Tamita Utama, Jakarta.

Katalog BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi*. Jambi

Kunarjo, 1999, *Perencanaan Dan Pembiayaan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta

Prakoso, KB, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta

Subandriyo, 2004, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Kota*

Jayapura, Makassar. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Sugio, 2001, *Manajemen Keuangan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Sunarto, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta

Syamsi, I. 1987. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. PT. Bina Aksara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah

_____, 34 tahun 2000. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

_____, 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

_____, 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah